

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring pesatnya globalisasi menjadikan semua sektor usaha mengalami perkembangan yang semakin signifikan sehingga memunculkan kesadaran pada emiten bahwa keberlangsungan hidup emiten bergantung pada ada keterkaitannya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar tempat operasional perusahaan. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory*, suatu emiten mempunyai kontrak dengan masyarakat untuk dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan bagaimana tanggapan emiten terhadap sejumlah kepentingan dari kelompok masyarakat untuk dapat melakukan legitimasi terhadap aktivitas perusahaan. Apabila terjadi ketidakseimbangan sistem nilai antara masyarakat dengan emiten maka legitimasi suatu emiten akan hilang dan dapat mengakibatkan terganggunya keberlangsungan hidup emiten (Rawi dan Muchlish, 2010).

Kasus CSR yang pernah berlangsung di Indonesia adalah kasus PT. Indominco, anak perusahaan dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Pada 4 Desember 2017 Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pidana denda Rp 2 miliar karena terbukti bersalah tanpa izin membuang (dumping) limbah perusahaan ke 3 sungai sepanjang 13,4 km, Santan, Kare dan Pelakan. Sungai tersebut memiliki peran penting bagi masyarakat untuk irigasi, perikanan, air bersih, dan transportasi (Mongabay, 16 maret 2018).

Kurangnya tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan menyebabkan sering terjadinya kasus pencemaran lingkungan. Selain itu, good corporate governance juga dapat diikutsertakan dalam pengelolaan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Hubungan antara GCG dan CSR sangatlah erat. Hal tersebut disebabkan CSR adalah suatu wujud kebijakan/strategi yang dilaksanakan oleh suatu emiten agar dapat memperoleh image positif di mata *stakeholder* ataupun masyarakat. Aktivitas tersebut memerlukan koordinasi antar manajemen dengan pemilik saham dalam menentukan aktivitas apa yang akan perusahaan lakukan. Implementasi GCG dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi keseimbangan antara hubungan pemilik saham dengan manajemen.

Mekanisme *Good Corporate Governance* ditandai dengan adanya ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, persentase dewan komisaris, jumlah komite audit, aktivitas komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Tata kelola/sistem dapat berlangsung baik apabila terdapat jaminan efektivitas keputusan yang dibuat oleh manajemen. Mekanisme kendali internal tertinggi ada pada dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan *top management*.

Dewan Komisaris menceminkan puncak dari mekanisme kendali internal pada suatu dengan peran ganda yaitu : *monitoring* (pengawasan) dan *ratification* (pengesahan). Efektivitas monitoring dapat terlaksana jika terdapat anggota manajemen yang berasal dari eksternal perusahaan yang memiliki independensi dalam bertindak. Independensi komisaris dapat mengakibatkan netralitas pada pengungkapan CSR yang akan dilakukan sehingga dapat sesuai dengan keadaan

nyata yang terjadi pada suatu emiten. Hasil riset Ratnasari (2011) dan Ginting (2017) mengemukakan jika terdapat hubungan yang positif antara persentase dewan komisaris dengan CSR.

Jumlah anggota menjadi patokan dalam pengukuran dewan komisaris. Apabila dewan komisaris beranggotakan lebih banyak personal maka CEO akan semakin mudah dalam pengendalian perusahaan dan dapat melakukan pengawasan dengan lebih efektif. Pada riset Ratnasari (2011) memperlihatkan jika pengungkapan CSR oleh perusahaan dipengaruhi secara positif signifikan oleh ukuran dewan komisaris.

Selain ukuran dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris juga berperan dalam pengungkapan CSR. Frekuensi pertemuan dapat dijadikan sebagai indikasi aktivitas dewan komisaris bentuk koordinasi anggota dewan yang satu dengan yang lainnya untuk membahas perkembangan dan kondisi perusahaan yang dapat berimbas pada penentuan kebijakan yang harus diungkapkan pada financial report termasuk juga pengungkapan CSR. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset Ratnasari (2011) dan Ginting (2017) yang mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh aktivitas dewan komisaris.

Mekanisme GCG lainnya adalah keberadaan komite audit. Komite audit bisa dijadikan perangkat yang memiliki efektivitas tinggi dalam hal pelaksanaan *monitoring* yang bisa mengakibatkan berkurangnya *cost agency*, mengoptimalkan kendali internal dan menambah kualitas informasi yang diungkap pada *financial report* termasuk juga pengungkapan CSR (Said *et al*, 2009). Hasil riset Ratnasari (2011) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh

komite audit. Komite audit yaitu suatu organisasi pembentukannya dilakukan oleh dewan komisaris sebagai pemberi bantuan bagi pelaksanaan fungsi dan tugas dewan komisaris yang memengaruhi manajemen untuk memperluas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Pelaksanaan tugas komite audit sangat terkait erat dengan berbagai pertemuan yang membahas tentang kebijakan perusahaan. Efektivitas dan kualitas pertemuan tersebut dapat menambah komitmen anggota komite audit dalam memajukan perusahaan melalui semakin baiknya aktivitas CSR pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Frekuensi pertemuan yang banyak dapat menjadi ajang *problem solving* bagi perusahaan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Riset Ratnasari (2011) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh aktivitas komite audit.

Menurut teori agensi, munculnya persoalan antara pemilik saham dan manajer dikarenakan rendahnya persentase agen yang memiliki saham perusahaan (Said *et al*, 2009). Pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan seharusnya dapat menyesuaikan dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan memperluas pengungkapan informasi sosial untuk meningkatkan citra perusahaan. Riset Elvina, dkk (2016) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan manajerial.

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan dalam hal pengendalian manajemen melalui efektivitas pengawasan yang lebih baik yang menjadikan dicantumkannya pengungkapan CSR yang lebih banyak. Tingkat persentase institusi yang cukup besar bisa memengaruhi proses penyusunan

*financial report* termasuk juga kebijakan memperluas pengungkapan CSR. Hasil penelitian Siregar (2017), mengemukakan investor institusional adalah pihak yang bisa melakukan pengawasan terhadap agen. Jika pihak institusi memiliki jumlah saham yang lebih banyak manajemen akan termotivasi untuk melakukan penyusunan *financial report* dengan memperluas pengungkapan CSR.

Hasil – hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh *Corporate Governance* terhadap CSR memberikan hasil yang tidak konsisten diantaranya adalah Untuk variabel ukuran dewan komisaris. Pada riset Ratnasari (2011) yang mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh ukuran dewan komisaris. Sedangkan riset Rohmah (2015) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara negatif tidak signifikan oleh ukuran dewan komisaris.

Untuk variabel aktivitas dewan komisaris. Pada riset Ratnasari (2011) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif signifikan oleh aktivitas dewan komisaris. Hasil tersebut tidak berbeda dengan riset Rohmah (2015) yang mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara negatif tidak signifikan oleh aktivitas dewan komisaris.

Untuk variabel dewan komisaris independen. Pada riset Ratnasari (2011) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif signifikan oleh persentase dewan komisaris independen. Sedangkan pada riset Rohmah (2015) dan Siregar (2017) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara negatif tidak signifikan oleh persentase dewan komisaris independen.

Untuk variabel jumlah komite audit. Pada riset Ratnasari (2011) dan Siregar (2017) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh signifikan oleh jumlah komite audit. Sedangkan pada riset Ginting (2017) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif tidak signifikan oleh jumlah komite audit.

Untuk variabel aktivitas komite audit. Pada riset Ratnasari (2011) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif signifikan oleh aktivitas komite audit. Sedangkan pada riset Sukasih dan Sugiyanto (2017), Siregar (2017) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif tidak signifikan oleh aktivitas komite audit.

Untuk variabel kepemilikan manajerial. Pada riset Elvina, dkk (2016) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif signifikan oleh kepemilikan manajerial. Hasil tersebut tidak berbeda dengan hasil riset Lesmana, dkk (2016), Sukasih dan Sugiyono (2017) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara negatif signifikan oleh kepemilikan manajerial.

Untuk variabel kepemilikan institusional. Pada riset Elvina, dkk (2016) mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan institusional. Hasil tersebut berbeda dengan hasil riset Rohmah (2015) dan Lesmana, dkk (2016) yang mengemukakan jika pengungkapan CSR dipengaruhi secara negatif signifikan oleh kepemilikan institusional.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ratnasari (2011), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ratnasari (2011) adalah : (1)

Penambahan variabel kepemilikan manajerial yang mengacu pada penelitian Lesmana, dkk (2016). Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan, variabel kepemilikan institusional yang mengacu pada penelitian Lesmana, dkk (2016) karena semakin besar tekanan terhadap manajemen oleh para pemegang saham institusional memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih besar. (2) Menambah variabel kontrol *size*, *leverage*, profitabilitas dan jenis industri. (3) Penelitian ini menggunakan sampel laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2014 - 2017. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ratnasari (2011) menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2006 - 2009.

## 1.2 Rumusan Masalah

*Legitimacy theory* menyatakan bahwa suatu emiten mempunyai kontrak dengan masyarakat untuk dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan bagaimana tanggapan emiten terhadap sejumlah kepentingan dari kelompok masyarakat untuk dapat melakukan legitimasi terhadap aktivitas perusahaan. Apabila terjadi ketidakseimbangan sistem nilai antara masyarakat dengan emiten maka legitimasi suatu emiten akan hilang dan dapat mengakibatkan terganggunya keberlangsungan hidup emiten. Kurangnya tingkat kepedulian perusahaan terhadap lingkungan menyebabkan sering terjadinya kasus pencemaran lingkungan. Selain itu, *good corporate governance* juga dapat diikutsertakan dalam pengelolaan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka perumusan pada riset ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris pada pengungkapan CSR?
- b. Bagaimana pengaruh aktivitas dewan komisaris pada pengungkapan CSR?
- c. Bagaimana pengaruh persentase dewan komisaris independen pada pengungkapan CSR?
- d. Bagaimana pengaruh jumlah komite audit pada pengungkapan CSR?
- e. Bagaimana pengaruh aktivitas komite audit pada pengungkapan CSR?
- f. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan CSR?
- g. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional pada pengungkapan CSR?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari riset ini antara lain untuk memberikan bukti empiris pengaruh-pengaruh berikut :

- a. Pengaruh ukuran dewan komisaris pada pengungkapan CSR.
- b. Pengaruh aktivitas dewan komisaris pada pengungkapan CSR.
- c. Pengaruh persentase dewan komisaris independen pada pengungkapan CSR.
- d. Pengaruh jumlah komite audit pada pengungkapan CSR.
- e. Pengaruh aktivitas komite audit pada pengungkapan CSR.
- f. Pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan CSR.
- g. Pengaruh kepemilikan institusional pada pengungkapan CSR.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari riset ini, antara lain :

#### **1.4.1 Bagi Akademisi**

Dapat membuktikan empiris tentang sejumlah faktor *good governance* yang dapat memengaruhi pengungkapan CSR sebagai pedoman bagi penelitian mendatang.



#### 1.4.2 Bagi Investor

Dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan kebijakan investasi melalui sejumlah faktor *good governance* yang dapat memengaruhi pengungkapan CSR.

#### 1.4.3 Bagi Perusahaan

Sebagai bahan acuan manajemen untuk menentukan kebijakan *good corporate* dan pengungkapan CSR.